

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk sebagai pembandingan dan penambah informasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Cost-Benefit Analysis of the South Korea-Japan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)</i>	Jae-Jeok Park	Penelitian ini membahas mengenai perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang yaitu <i>General Security of Military Agreement (GSOMIA)</i> mengenai perkembangan nuklir Korea Utara. Penelitian ini sama-sama mengatakan bahwa perjanjian ini berfungsi untuk mengembangkan posisi pertahanan yang lebih efektif antara dua Negara tersebut.	Perbedaan yang dapat diperoleh antara penelitian yang dilakukan oleh Jae-Jeok Park dengan penelitian yang saya buat adalah Jae-Jeok Park lebih membahas mengenai bagaimana perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang ini ditunda akibat statement anti-Jepang dari pihak Korea Selatan, selain itu Jae-Jeok Park juga menganalisis <i>cost-benefit</i> dari kerjasama tersebut. Sedangkan penelitian saya lebih membahas bagaimana kerjasama GSOMIA tersebut muncul sebagai respon atas perkembangan nuklir Korea Utara.
2	Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan	Imro'atul Mufidah dan Zaky Ismail	Penelitian ini memiliki persamaan dimana sama-sama membahas	Penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian ini lebih membahas mengenai keputusan Korea Selatan

	Pemutusan Pakta Intelijen General Security Of Military Information Agreement Dengan Jepang Pada Tahun 2019		mengenai bagaimana ancaman nuklir Korea Utara menjadi penyebab Korea Selatan melakukan perjanjian dengan Jepang.	untuk membatalkan pemutusan pakta perjanjian GSOMIA dengan Jepang. Sedangkan penelitian saya lebih membahas bagaimana kerjasama GSOMIA tersebut muncul sebagai respon atas perkembangan nuklir Korea Utara.
3	<i>Quasi-Alliance at Play: The Curious Case of South Korea's Aborted Withdrawal from GSOMIA in 2019</i>	Resi Qurrata Aini dan Yandry Kurniawan	Penelitian ini memiliki fokus aktor yang sama yaitu Korea Selatan dan Jepang yang memutuskan untuk bekerja sama sebagai sebuah respon akibat perkembangan senjata nuklir Korea Utara.	Perbedaannya adalah penelitian ini menyatakan bahwa Korea Selatan berada dalam posisi <i>abandonment fears</i> yaitu ketakutan akan diabaikan oleh Jepang hal ini diperbesar oleh ketidakpastian komitmen dari AS. Sedangkan penelitian yang saya buat lebih menggunakan teori <i>security dilemma</i> yang dipercayai merupakan sebuah respon akibat ancama nuklir Korea Selatan.

Literatur pertama yaitu penelitian yang berjudul “*Cost-Benefit Analysis of the South Korea-Japan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)*” ditulis oleh Jae-Jeok Park dari *Korea Institute for National Unification*. Dalam penelitian ini, Jae-Jeok Park menganalisis *cost-benefit* dari kerjasama *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang mengenai ancaman perkembangan nuklir Korea Utara. Menurut Jae-Jeok Park, perkembangan senjata nuklir di Korea Utara menyebabkan Korea Selatan dan Jepang harus mengembangkan posisi pertahanan yang lebih efektif sehingga berbagi informasi dari GSOMIA tentang

ancaman militer Korea Utara sangatlah penting. Jae-Jeok Park menyatakan bahwa Jepang mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan lebih lanjut terhadap informasi yang dihasilkan oleh Korea Selatan sendiri. Negara yang berkonfrontasi langsung dengan Korea Utara ini sangat menghargai informasi sekecil apapun (Park, 2012). Selain itu, berdasarkan ketentuan GSOMIA, Korea Selatan pada nyatanya tidak diwajibkan untuk memberikan semua informasinya mengenai Korea Utara kepada Jepang, dan oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Jepang menerima akses ke informasi yang tidak ingin dibagikan oleh Korea Selatan. Dengan kata lain, ada manfaat nyata bagi GSOMIA dengan Jepang dalam mengumpulkan informasi tentang Korea Utara. Jae-Jeok Park menutup penelitiannya dengan harapan Korea Selatan dan Jepang melakukan pertukaran militer tingkat rendah melalui GSOMIA untuk mengamankan pengaruh atas China. Jae-Jeok Park mengatakan bahwa GSOMIA dapat menyampaikan pesan ke China bahwa Korea Selatan akan memperluas pertukaran militernya dengan Jepang jika perlu karena alasan geopolitik, meskipun ada sentimen anti-Jepang di Korea Selatan. Jika China terus menunjukkan sikap bias terhadap provokasi militer Korea Utara bahkan setelah GSOMIA ditandatangani, maka Korea Selatan dan Jepang harus secara bertahap meningkatkan tingkat pertukaran militer, termasuk penandatanganan Perjanjian Dukungan Logistik Bersama (MLSA). (Park, 2012)

Literatur kedua yaitu literatur yang memiliki judul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen General Security Of Military Information Agreement Dengan Jepang Pada Tahun 2019” ditulis oleh Imroatul Mufidah dan Zaky Ismail pada Jurnal SIYAR. Dalam

literatur ini, Imro'atul dan Zaky menganalisis kebijakan dari Korea Selatan yang membatalkan pakta pemutusan perjanjian *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dengan Jepang. Imro'atul dan Zaky mengungkap alasan-alasan keputusan negara Korea selatan untuk membatalkan pengunduran diri Korea Selatan dari perjanjian GSOMIA dengan Jepang. Salah satu dari alasan tersebut adalah fenomena Ketegangan di Semenanjung Korea yang terjadi pada tahun 2016-2019, perkembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mulai dari tahun 2016 sampai 2019 memperkuat ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Walaupun ketegangan antara dua Negara tersebut sempat diatasi oleh KTT mengenai perkembangan senjata nuklir Korea Utara, namun ternyata KTT tersebut mengalami kebuntuan akibat penolakan Korea Utara terhadap sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Melihat alasan tersebut, Imro'atul dan Zaky berasumsi bahwa akibat masih adanya ketegangan yang muncul akibat perkembangan senjata nuklir Korea Utara merupakan alasan bagi Korea Selatan untuk tidak jadi membatalkan kerjasamanya dengan Jepang. Selain itu, Imro'atul dan Zaky juga menghubungkan kebijakan Korea Selatan ini dengan teori keamanan nasional. Imro'atul dan Zaky mengungkapkan bahwa keamanan nasional sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Pentingnya menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ada bertujuan untuk melindungi rakyat negara dari ketakutan darurat yang akan datang. Untuk melindungi negara tercinta mereka dan mengamankan perbatasan nasional, Setiap negara membutuhkan pasukan tentara yang kuat dan aktif, disertai dengan intelijen yang efektif, sistem hukum yang dapat dipercaya, kebijakan imigrasi dan keamanan siber yang maju. Dalam hal ini, Korea Selatan adalah negara kaya dengan

kemampuan militer yang kuat (Imro'atul Mufidah dan Zaky Ismail, 2022). Dengan adanya perjanjian GSOMIA ini, Jepang dapat memberikan informasi mengenai aktivitas peningkatan nuklir Korea Utara. Informasi tersebut merupakan Informasi penting yang akan membantu mengatasi kekhawatiran Korea Selatan dari ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara yang akan mengancam keamanan negaranya.

Literatur ketiga adalah literatur yang berjudul "*Quasi-Alliance at Play: The Curious Case of South Korea's Aborted Withdrawal from GSOMIA in 2019*" ditulis oleh Resi Qurrata Aini dan Yandry Kurniawan pada Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP). Literatur ini membahas bagaimana Korea Selatan dan Jepang yang memiliki *background history* kurang baik dapat tetap menjaga kerjasama keamanan antara kedua negara tersebut. Resi dan Yandry menjelaskan bahwa Salah satu faktor yang mendorong Korea Selatan membatalkan keputusannya untuk keluar dari GSOMIA adalah persepsi ancaman yang harus diatasi sendiri oleh Korea Selatan apabila memutuskan untuk keluar dari GSOMIA (Aini & Kurniawan, 2021). Fase terburuk dalam hubungan Korea Selatan-Jepang sejak normalisasi hubungan pada tahun 1965. Munculnya kembali isu sejarah kekejaman Jepang di masa lalu terhadap Korea Selatan telah meningkat ke aspek ekonomi yang menghambat industri chip semikonduktor yang vital bagi perekonomian Korea Selatan dan nasionalnya. Hal tersebut mempengaruhi kerjasama dua negara yaitu Korea Selatan dan juga Jepang sehingga Korea Selatan mengeluarkan pernyataan resmi pada Agustus 2019 yang mengumumkan akan mundur dari GSOMIA. Namun, pada November 2019, sebelum masa kerja sama berakhir, pembatalan keputusan untuk keluar dari GSOMIA dinyatakan oleh

Korea Selatan. Resi dan Yandry berpendapat bahwa tidak menguntungkan bagi Korea Selatan untuk berdiri sendiri untuk "menyeimbangkan" kekuatan besar ini di kawasan tanpa GSOMIA. Korea Selatan mengakui Jepang sebagai pilihan mitra yang paling mungkin karena Korea Selatan menyadari terdapat kekurangan aliansi alternatif. Akibatnya, Korea Selatan memutuskan untuk merembukan kembali konflik yang dialami oleh negara tersebut dengan negara Jepang. Ketika munculnya ketakutan akan pengabaian dari suatu negara, mempertahankan kuasi-aliansi bahkan dengan mitra yang dilematis dapat dikatakan sebagai alternatif kebijakan terburuk yang terbaik untuk dikejar oleh suatu negara (Aini & Kurniawan, 2021).

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai keadaan *security dilemma* yang diakibatkan oleh munculnya persepsi ancaman yang dialami oleh Korea Selatan dan Jepang. Berbeda dari 3 penelitian diatas, penulis lebih menekankan bagaimana keadaan *security dilemma* ini terjadi sehingga Korea Selatan dan Jepang dapat memutuskan untuk bekerjasama melalui GSOMIA itu sendiri. Korea Selatan dan Jepang yang memiliki latar belakang *historical* yang kurang baik pada akhirnya dapat memutuskan untuk bekerjasama akibat munculnya persepsi ancaman akibat perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Politik Internasional

Teori Politik Internasional merupakan teori yang berkaitan dengan status atau isu-isu politik dalam komunitas internasional memiliki fokus pada diplomasi dan politik internasional. Dalam pengertian yang lebih luas, Politik Internasional berfokus pada diplomasi dan interaksi antara pemerintah dan lembaga politik

lainnya. Politik internasional merupakan suatu wadah atau proses interaksi berbasis lingkungan, atau proses interaksi, interplay, dan interelasi di antara para pemain dalam lingkungannya. Faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1.) Penyebaran sosial dan perilaku, yang mengandung makna sebagai hasil dari pemikiran manusia, yang menghasilkan budaya politik dan kemunculan kelompok-kelompok elit tertentu; 2.) Lingkungan fisik, yang meliputi letak sumber daya alam, geografis, dan teknologi suatu negara; dan 3.) Kemunculan lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional.

Politik internasional, seperti halnya semua politik, pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan. Apa pun tujuan akhir dari kekuatan politik, tujuan yang paling nyata adalah kekuasaan. Para negarawan atau rakyat mungkin mengejar kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu sendiri pada akhirnya. Tujuan mereka dapat diekspresikan dalam bentuk keyakinan agama, filosofis, ekonomi, atau sosial. Mereka mungkin percaya bahwa cita-cita ini akan terwujud dengan kekuatan takdir atau dengan perkembangan alamiah dari kejadian-kejadian manusia. Mereka mungkin juga mencoba cara-cara non-politik untuk memajukan implementasinya, seperti kerja sama teknis dengan pemerintah lain atau organisasi internasional. Namun, semua itu dibingkai oleh apa yang dikenal sebagai kekuasaan. Menurut (Waltz, 1979) pada *Theory of International Politics* (1979), sebagian besar fitur penting dari hubungan internasional, terutama tindakan negara-negara besar, dapat dijelaskan hanya dalam kerangka struktur anarkis sistem internasional. Dalam bukunya tersebut, Waltz memberikan beberapa asumsi, asumsi ini adalah:

- Sistem internasional memiliki sifat anarkis dimana tidak adanya otoritas pusat yang lebih tinggi yang dapat menegakkan peraturan atas masing-masing negara.
- Mengingat konteks tersebut, negara dipercayai bertindak atas dasar swadaya: Negara-negara tersebut beroperasi dengan tujuan untuk bertahan hidup selain itu interaksi yang dilakukan dengan negara lain membuktikan keinginan negara untuk bertahan hidup.
- Struktur hanya berubah jika kekuatan besar mengambil tindakan yang mengarah pada perubahan. Sebagian besar negara bagian tidak memiliki kekuatan untuk mengubah struktur. Mengingat konteks ini, negara-negara akan mencoba menyeimbangkan satu sama lain karena mereka akan mencoba meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup.

Keseimbangan dapat dicapai dengan dua cara: internal dan eksternal. Keseimbangan internal mengacu pada penggunaan kekuatan militer untuk mengimbangi negara lain. Keseimbangan eksternal mengacu pada aliansi negara melawan kekuatan atau hegemoni yang lebih kuat. Negara memilih yang lebih lemah dari koalisi saat ini karena mereka memahami bahwa pihak yang lebih kuat mengancam keamanan mereka.

Penelitian ini menggunakan teori Politik Internasional dengan menghubungkan bagaimana Korea Selatan dapat memutuskan untuk bekerjasama dengan Jepang dalam menghadapi persepsi ancaman yang sama yang disebabkan oleh perkembangan senjata mematikan nuklir yang secara langsung menjadi ancaman bagi kedua negara. Hal tersebut dianalisa menggunakan teori politik

internasional dimana negara akan selalu berusaha menjaga kestabilan negaranya akibat sistem internasional yang anarki.

2.2.2. *Security Dilemma*

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *security dilemma* sebagai dasar kerangka berfikir dalam melakukan penelitian ini. Konsep *security dilemma* ini pertama kali dikembangkan oleh Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis.

Konsep ini dapat dikatakan merupakan konsep turunan dari paradigma realis. *Security dilemma* atau Dilema keamanan dapat dikatakan sebagai hubungan teoretis dari realisme defensif, karena bagi realis defensif, dilema keamananlah yang memungkinkan kerja sama sejati antar negara dimana kerjasama tersebut melampaui aliansi sekilas dalam menghadapi musuh bersama. Konsep ini tidak lepas dari asumsi realis yang mengatakan bahwa politik internasional tidak lepas dari sistem internasional yang bersifat anarki. Sistem internasional yang anarki ini dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana tidak adanya otoritas tertinggi dan pusat kekuasaan dalam sistem internasional sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan negaranya dalam mencapai kepentingannya. Robert Jervis menekankan konsep *security dilemma* ini bahwa peningkatan keamanan satu negara dapat membuat negara lain kurang aman, bukan akibat salah persepsi, tetapi karena konteks hubungan internasional yang anarkis sehingga walaupun negara tersebut yakin bahwa niat negara lain saat ini memiliki niat yang baik, mereka tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa negara lain akan menjadi agresif di masa depan atau secara kredibel menjamin bahwa mereka sendiri akan tetap damai (Tang, 2009). Penekanan Jarvis tersebut dapat

disimpulkan kembali bahwa keadaan *security dilemma* ini pada dasarnya didasari oleh rasa ketidakpercayaan suatu negara terhadap negara lainnya, sehingga apabila negara tersebut merasa terancam dengan negara lain, negara tersebut lebih memilih untuk membuat keputusan dengan mengambil sikap *defensive*.

Menurut (Anders, 2011) *security dilemma* merupakan situasi di mana tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menyebabkan reaksi dari negara lain, yang mengarah pada penurunan dan bukannya peningkatan keamanan negara tersebut. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kawasan Asia Timur serta negara-negara di dalamnya merasa terancam akibat adanya program perkembangan senjata mematikan nuklir Korea Utara. Rasa ketidakpercayaan yang dialami oleh Korea Selatan pun muncul karena perkembangan senjata nuklir Korea Utara tersebut akan memunculkan reaksi dari negara-negara lain yang memungkinkan untuk meningkatkan keamanan negara. Sehingga akibat persepsi ancaman yang muncul dari Korea utara yang melakukan perkembangan senjata mematikan nuklir, Korea Selatan memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara Jepang. Kebijakan Korea Selatan tersebut merupakan respon dari keadaan *security dilemma* yang muncul akibat perkembangan senjata nuklir Korea Utara.

2.2.3. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu bagian dari hukum internasional. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijelaskan bahwa :

“Perjanjian Internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.”

Selain itu, pengertian dari perjanjian internasional ini juga ditulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa:

“An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation”.

Dalam melihat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dilakukan oleh aktor internasiolan berbentuk tertulis yang diatur oleh Hukum Internasional dan juga memuat obyek tertentu yang akan diperjanjikan. Perjanjian Internasional terdiri dari beberapa istilah diantaranya adalah *Treaty, Convention, Agreement, Memory of Understanding (MoU), Deklarasi, Protokol dan Adjustment, Statuta (Statute) dan Piagam (Charter), Modus Vivendi, dan Concordat*

Penelitian ini menggunakan teori Perjanjian Internasional dimana penelitian ini membahas Korea Selatan dan Jepang yang melakukan Perjanjian Internasional dalam istilah *Agreement* yang ditandatangani pada tahun 2016. *Agreement* adalah perjanjian internasional yang mengatur topik-topik yang sangat spesifik mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan administratif, oleh karena itu ketika frasa ini digunakan dalam perjanjian internasional, maka substansi yang diatur mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan jangkauannya tidak terlalu luas.

2.2.4. Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ini mengamati kebijakan negara Korea Selatan yang memutuskan untuk bekerjasama dengan negara rivalnya yaitu Jepang akibat persepsi ancaman yang sama mengenai perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

Menurut (Holsti, 1973) Kebijakan Luar Negeri dikatakan sebagai suatu gagasan yang dibentuk untuk memecahkan suatu masalah maupun membentuk perubahan dalam suatu sistem. Dalam memenuhi kepentingan setiap negara dihadapkan oleh perbedaan-perbedaan kepentingan serta perbedaan kebijakan negara-negara lainnya. Kebijakan Luar Negeri ini merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh negara dalam mengatasi perbedaan kebijakan antar negara tersebut. Dalam hal kebijakan luar negeri, pemerintah harus mengambil keputusan mengenai instrumen apa yang akan digunakan. Instrumen yang termasuk di dalamnya dapat berupa cara-cara damai (instrumen damai) atau cara-cara kekerasan (instrumen kekerasan). Diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, intervensi, perang, dan senjata adalah contoh-contoh instrumen kebijakan luar negeri. Dalam mengembangkan dan menjalankan politik luar negeri dalam teori politik luar negeri suatu negara memiliki 3 rumusan, antara lain;

1. Nilai, komponen esensial dari dorongan untuk merumuskan politik luar negeri merupakan tujuan dari suatu negara. Sesuai dengan tujuan suatu negara, politik luar negeri akan dikembangkan serta dilaksanakan.

2. Faktor waktu, dalam politik luar negeri terdapat unsur waktu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan.
3. Jenis tuntutan target, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, tuntutan target merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh negara.

2.2.5. Persepsi Ancaman

Persepsi ancaman adalah sudut pandang politik suatu negara. Persepsi, menurut John E. Mroz, adalah pemahaman dan kesadaran akan peristiwa, keadaan, atau proses. Pemahaman dan kesadaran diri ini pada gilirannya akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatu. Persepsi ancaman dan persepsi historis dikembangkan sebagai hasilnya. Menurut Mroz, persepsi ancaman adalah keyakinan bahwa apa pun yang dilakukan lawan selalu menjadi ancaman baginya (Mroz., 1981). Persepsi ancaman dapat ditelusuri kembali ke gagasan realisme, yang didasarkan pada empat asumsi utama. Pertama, kaum realis menganggap negara sebagai aktor utama atau paling penting dalam politik internasional (*states are the primary or most important actors*). Kedua, negara dianggap sebagai aktor yang menyatu (*states are a unified actor*). Ketiga, negara pada dasarnya adalah aktor yang logis. Keempat, keamanan nasional merupakan hal yang paling penting dan didahulukan dari yang lainnya (*national security is at the top of the list in the hierarchy of international issues*) (Viotti dan Kauppi 1999). Teori ini ada karena keempat asumsi tersebut. Kehadiran persepsi ancaman merupakan turunan dari isu keamanan nasional, yang merupakan isu inti dari realisme, dan hal ini menjadikan persepsi ancaman sebagai konsekuensi

logis dari keyakinan tentang keamanan nasional yang menjadi dasar dari teori realis (Jaka, 2011).

Menurut (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015) dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, ancaman dikategorikan menjadi dua kategori yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata adalah yang dapat datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan juga sering terjadi dan dihadapi setiap saat kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keamanan seluruh bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang harus disikapi lebih awal seperti ancaman wabah penyakit, bencana alam, separatisme dan pemberontakan bersenjata, terorisme dan radikalisme, pembajakan dan pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba serta serangan dunia maya dan spionase. Ancaman belum nyata adalah bentuk bahaya berupa konflik terbuka atau perang konvensional dimana angkatan bersenjata negara-negara saling berhadapan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Korea Selatan dan Jepang menghadapi persepsi ancaman yang sama akibat perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sehingga Korea Selatan dan Jepang memutuskan untuk bekerjasama dengan menandatangani GSOMIA pada tahun 2016. Hal tersebut dijadikan alasan untuk menggunakan teori persepsi ancaman dalam penelitian ini.

2.2.6. Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan memainkan peran penting dalam menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan di sebagian besar negara. Bagi banyak negara, itu adalah instrumen khusus kebijakan luar negeri dan menempati tempat permanen dalam sistem kerja sama antara negara dan organisasi regional dan internasional. Kegiatan diplomasi pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan negara berkontribusi pada peningkatan kerja sama militer dan membangun hubungan yang sesuai antar negara. Di bidang ini, khususnya, mengaktifkan sumber daya Kementerian Pertahanan, termasuk Angkatan Bersenjata (Muniruzzaman, 2020).

Menurut Cottey & Forster, melakukan kegiatan-kegiatan berikut dengan negara mitra diplomasi pertahanan dapat dilaksanakan, kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1) Pertemuan personil pertahanan militer dan sipil secara multilateral maupun bilateral; 2) Pertemuan pejabat pertahanan militer dan sipil secara bilateral dan multilateral; 3) Membuat perjanjian kerjasama pertahanan; 4) Melatih aparat pertahanan; 5) Penugasan atase pertahanan; 6) Menyediakan peralatan pertahanan bagi negara mitra; 7) Pemberian rekomendasi terkait strategi pertahanan; 8) Menerjunkan aparat pertahanan ke negara mitra; 9) Menugaskan kelompok pelatih ke negara mitra; dan 10) Melaksanakan latihan gabungan (Cottey & Forster, 2004).

Menurut teori diatas, Korea Selatan dan Jepang melaksanakan diplomasi pertahanan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Cottey dan Forster yaitu membuat perjanjian kerjasama pertahanan. Kedua Negara tersebut melakukan diplomasi pertahanan melalui kerjasama *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)*.

2.3. Asumsi Penelitian

Kerjasama yang dilakukan oleh Negara Korea Selatan dan Jepang mengenai peningkatan nuklir Korea Utara yaitu *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) ini terjalin karena keadaan *security dilemma* antara dua negara akibat perkembangan senjata nuklir Korea Utara. Walaupun melihat sejarah antara Korea Selatan dan Jepang yang kurang baik akibat perasaan traumatik Korea Selatan terhadap Jepang pada nyatanya hal tersebut dikesampingkan akibat munculnya persepsi ancaman yang sama sehingga mengakibatkan keadaan *security dilemma* itu sendiri. Sistem Internasional yang anarki juga menjelaskan bagaimana Korea Selatan dan Jepang merasa terancam dengan peningkatan kemampuan militer melalui perkembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara.

2.4. Kerangka Analisis

